

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) adalah masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah, karena perempuan rawan sosial ekonomi merupakan salah satu tertinggi penyumbang kemiskinan dengan mempunyai pendapatan yang dibawah rata-rata menyebabkan kesenjangan sosial (Khoirudin. R, Hidayat. M, 2019). Pembangunan tingkat kesejahteraan sosial (Kesos) menjadi satu bagian tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional, dimana pembangunan dari kesejahteraan sosial memiliki peran aktif untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia (Pramudiana. DI, 2019). Karena, Dimasa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kementerian pemberdayaan perempuan, permasalahan kemiskinan akan selalu jadi topik utama yang paling penting (Handayani, 2019).

Sesuai diawal pembukaan UUD 1945 telah terdapat tujuan dari suatu pembangunan nasional ialah untuk melahirkan sutau masyarakat yang adil dan makmur, secara material, dan spiritual secara Pancasila, di dalam ruang lingkup negara kesatuan republik Indonesia yang sudah merdeka, berdaulat, dan bersatu, dalam kondisi kehidupan di bangsa-bangsa damai, tentram, tertib, dan dinamis, dengan ruang lingkup kehidupan dalam negara yang sudah merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Namun banyaknya kegiatan-kegiatab atau planning pembangunan ekonomi yang belum terpenuhi dalam mensejahterakan masyarakat dan bangsa/negara. Serta pembangunan ekonomi di setiap sector-sektor juag belum mampu memenuhi dan menampung keinginan/kebutuhan masyarakat (Solikatun, Supono, & Masruroh, 2016).

Pada dasarnya tujuan dari pada negara ialah melakukan pembangunan, pembangunan dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang Makmur bagi masyarakat yang luas dan melahirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Meningkatnya nilai kesejahteraan di dalam masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan ekonominya, selain itu dapat ditinjau juga dari pendapat setiap perkapita itulah yang selalu dijadikan suatu tolak ukur dari sebuah kinerja perekonomian secara menyeluruh meskipun tidak memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara utuh. Faktor-faktor yang menjadi point penting yang diabaikan untuk mengukur tingkat kesejahteraan yaitu dengan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ialah bagaimana seluruh pendapatan/penghasilan yang telah didapatkan kemudian di distribusikan kembali kepada seluruh masyarakat. Pembagian pendapat distribusi yang tidak merata akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendapatan merupakan problem dari pembangunan yang dihadapi oleh seluruh negara-negara tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan/penghapusan kemiskinan selalu menjadi sarana terakhir dari sebuah proses-proses pembanginan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan secara adil bagi seluruh masyarakat (Murohman, Hutagaol, & Asmara, 2018).

Strategi dan program dari penanggulangan tingkat kemiskinan yang selalu menjadi tujuan utama pemerintah Indoneisa pada saat ini, agar lebih cepat memberantas kemiskinan menuju masyarakat dan penduduk yang hidup Sejahtera (ARTIKA, KEMBARYANA, MARINI, & NOPIARI, 2020). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk perempuan rawan sosial ekonomi yang disusun oleh pemerintah indonseia. (Afriyandi, 2020). Pemberdayaan masyarakat yang msikin merupakan program dan salah satu strategi pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada dibangsa Indoneisa. Program

pemberdayaan masyarakat yang rawan akan masalah sosial dan ekonomi diharapkan mampu diimplementasikan dengan baik. (Poluakan, V, M., Mulyana, N, & Rachim, A, 2020).

Program perempuan rawan sosial ekonomi termasuk dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang pemerintah dinas sosial Kabupaten Sleman berikan sebagai bentuk pemberdayaan kepada perempuan rawan sosial ekonomi dengan memberikan training dan pendampingan kepada masyarakat. Di program pemberdayaan ini memang ditujukan kepada perempuan. Seperti tabel dbawah beberapa binaan pemerintah Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman lakukan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi terhadap keluarganya.

Tabel 1: Nama-Nama Binaan Kelompok Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
Tahun 2006-2016

No	NAMA KELP PRSE	DESA	NAMA KETUA	JADWAL PERTEMUAN	TAHUN	JUMLAH ORANG
1.	PANDOWO MAJU	PONDOWO HARJO	SRI SUHATI	MINGGU III	2006	13 ORG
2.	TRIMULYO SEJAHTERA	TRIMULYO	PARMINAH	MINGGU II	2006	11 ORG
3.	SUMBER REZEKI LESTARI	AMBARKET AWANG	SISTIM RELAWATI	TGL. 16	2007	25 ORG
4.	BAROKAH	MARGOKATON	SRI HIDAYATI	TGL. 10	2008	13 ORG
5.	CAHAYA AGUNG BAROKAH	MARGOAGUNING	RUBINAH	TGL. 01	2008	8 ORG
6.	NGUDIMULYO	MARGOMULYO	JUMIRAH	TGL. 25	2009	15 ORG
7.	DADI AYEM	MARGOABADI	YATMI	TGL. 15	2009	15 ORG
8.	KARTINI MANDIRI	MARGOLUWIH I	TRI ISNANI	TGL. 05	2010	16 ORG
9.	SENDANG REZEKI	MARGOLUWIH II	SUGIRAH	TGL. 05	2010	14 ORG
10.	DADI RAHAYU	MARGODADI II	SUYATI	TGL. 15	2010	10 ORG

11.	MADU PUSPA INDAH	MADUREJO	HARUMI	TGL. 25	2011	20 ORG
12.	PONDOK MAKMUR	PONDOKREJO	NUR KHASANA H	TGL. 11	2011	10 ORG
13.	SUMBER MAKMUR	SUMBERREJO	JUMINAH	TGL. 25	2011	10 ORG
14.	SAKINAH	MADUREJO	TRIYANI	TGL. 15	2012	20 ORG
15.	WANITA MANDIRI	LUMBUNGR EJO	ATMI TITI LESTARI	TGL. 10	2012	20 ORG
16.	BOKO AYU MANDIRI	BOKOHARJO	CAECILIA' S TATRI	TGL. 11	2013	22 ORG
17.	HANGGO LESTARI	TRIHANGGO	SUMARTI NI	TGL. 10	2013	26 ORG
18.	SINAR REZEKI	SINDUHARJO	SUDARMI NAH	TGL. 13	2014	20 ORG
19.	MINO MAKMUR	MINOMART ANI	SUMARSI H	TGL. 16	2014	20 OG
20.	SINDU MEKARSARI	SINDUMART ANI	RR. ERA P.	-	2015	15 ORG
21.	BIMA JAYA MANDIRI	BOIMOMAR TANI	TATIK ROSITA	-	2015	15 ORG
22.	SARI WANITA TAMA	SENDANGS ARI	TUKIJEM	TGL. 3	2015	15 ORG
23.	SEJAHTERA MANDIRI	SENDANGR EJO	BUDI SURYANI	TGL. 15	2015	16 ORG
24.	WANITA KARYA	SUMBER RAHAYU	ETIK	TGL 26	2015	20 ORG
25.	WANITA SEJAHTERA	UMBULMAR TANI	ZAKIYAH	TGL 13	2015	20 ORG

Sumber Data: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sleman

Program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) diKabupaten Sleman ada sejak tahun 2006 hingga saat ini meskipun sempat tertunda pada tahun 2020 karena pademi covid19 yang melanda Indonesia bahkan dunia. Namun kelompok-kelompok PRSE yang sudah terbentuk sebelumnya hingga saat ini masih tetap berjalan sesuai dengan kegiatan masing-masing kelompok. Kelompok-kelompok PRSE yang sudah dibentuk memang mempunyai kegiatan rutin setiap bulannya dan untuk selalu membangkitkan kegiatan yang mereka lakukan pemerintah memberikan dana simpan pinjam. Program PRSE mungkin dikatakan sebagai salah satu strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena masalah kemiskinan akan

mempengaruhi tercapainya suatu kebutuhan hidup disetiap hari, menurunnya dan rendahnya penghasilan masyarakat juga karena ketidak mampuan dari segi keterampilan masyarakat, social, budaya dan politik. Dalam program pemberdayaan dilaksanakan dengan mengikut sertakan masyarakat secara keseluruhan. Mau dari melihat permasalahan, merumuskan, planning untuk tahap pelaksanaan dan evaluasi seluruh program-program yang memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Farhan, W., Wahyu, I., & Meganingrum, 2020).

Berperannya pemerintah dapat diperhatikan melalui perilaku pemerintah untuk menuntaskan masalah kemiskinan. Peranan pemerintah yaitu sebuah pengatur kebijakan dari permasalahan pembangunan ekonomi, pemerintah juga berperan untuk meninjau bagaimana sebuah pelaksanaan dari rancangan pembangunan ekonomi itu dapat berjalan secara efisien. Dengan melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan, apakah perencanaan pembangunan sesuai dengan sasaran telah ditetapkan, dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah sangat memiliki peran sebagai seorang yang mengendalikan. Setiap upaya dalam mensterahkan perkembangan sebagai suatu sector ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah keluarga miskin, yang diperlukan adalah pengawsan dan peraturan oleh negara/pemerintah agar bisa mencapai perkembangan yang seimbang (Herlina & Komariah, 2017).

Pemerintah memiliki peran penting untuk mengeluarkan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Program PRSE adalah salah satu program dari Kementrian Sosial Republik Indonesia yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah Dinas sosial Kabupaten. Program ini memang dikhususkan untuk perempuan-perempuan yang mempunyai masalah sosial dan ekonomi, sehingga program ini sangat unik untuk dikaji dalam intensi pencapaian keberhasilan. Dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul tentang efektivitas program perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) diKabupaten Sleman untuk masyarakat miskin periode

2017-2018 (Dinsos Kab. Sleman). Dalam penelitian ini peneliti akan mengacu kepada dua rumusan masalah yang akan dijadikan hasil analisis akhir penelitian agar mendapatkan data relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Program perempuan rawan sosial ekonomi tentunya memiliki tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan pastinya program ini salah satu tujuan untuk menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman. Kemiskinan memang selalu menjadi masalah pokok utama disetiap kota. Dalam pengentasan kemiskinan pemerintah harus bisa bekerja lebih lagi sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan peraturan yang ada harus bisa dijalankan seiring dengan pelaksanaan program itu sendiri, sehingga efektivitas program bisa sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program perempuan rawan sosial ekonomi merupakan program khusus bagi perempuan-perempuan yang mengalami masalah perekonomian dan sosial. Sehingga tujuan dan sasaran dari program ini adalah perempuan belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian yang terdapat dilatar belakang, maka masalah dalam penelitian ini peneliti putuskan adalah

- 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di Kabupaten Sleman?**
- 2. Factor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas program rawan sosial ekonomi (PRSE) di kantor Dinsos Kabupaten Sleman?**

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) di kantor Dinsos Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program rawan sosial ekonomi (PRSE) di kantor Dinsos kabupaten Sleman.

1.3 Manfaat Penelitian

Sesudah penelitian ini dituntaskan, diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif untuk penulis sendiri didalam memperbanyak wawasan maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dalam penelitian. Adapun manfaat yang terdapat dalam penelitian diharapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya khasanah ilmu di bidang administrasi publik dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian- penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada umumnya dan Pemerintah Dinsos Kabupaten Sleman pada khususnya dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.